



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

Satu Dekade BBJ Jadi JFX ■

**LKB Tunggal Sama
Saja Monopoli** ■



**KADO AKHIR
TAHUN 2010**



DARI REDAKSI

Di akhir tahun 2010, ini, ada banyak keceriaan yang akan dilewati. Kita akan meninggalkan kenangan manis dan pahit yang terjadi sepanjang tahun. Dan, menyimpannya sebagai sejarah. Di sisi lain, kita akan memasuki hari-hari baru di tahun 2011 yang penuh dengan tantangan. Mampukah kita mengukir sejarah terbaik sepanjang tahun yang akan datang itu?

Tetapi yang jelas, diakhir tahun 2010 ini, industri perdagangan berjangka komoditi dan pelaku sistem resi gudang Indonesia menerima kado yang istimewa.

Betapa tidak, DPR RI melalui Sidang Paripurna yang diselenggarakan pada 16 Desember 2010, lalu, menentukan sikap politiknya untuk mengamandemen Undang-Undang No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang. Istimewanya lagi, amandemen dua undang-undang yang berada di bawah naungan Bappebti itu merupakan inisiatif dari DPR RI.

Amandemen undang-undang tersebut, khususnya Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, sudah sejak lama ditunggu-tunggu. Hal itu untuk memberi ruang gerak yang lebih fleksibel dalam pengembangan industri perdagangan berjangka Indonesia di masa mendatang.

Di sisi lain, amandemen ini juga menjawab pentingnya instrument perdagangan berjangka komo-

diti bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Sejak disahkan menjadi undang-undang, implementasi pembiayaan dengan skema Sistem Resi Gudang masih menghadapi berbagai kendala. Pengembangan instrument ini cenderung upaya pemerintah pusat dalam mengerjakan sektor riil di daerah. Pada hal, semestinya instrument ini tumbuh dan berkembang dari pelaku komoditi atau pun petani yang ada di daerah.

Istimewanya lagi, dua undang-undang tersebut digaransi oleh Anggota DPR selesai dalam waktu yang singkat. Sehingga, ditriwulan pertama tahun 2011, dua undang-undang itu sudah bisa diimplementasikan.

Kado istimewa yang tak indahnya diakhir tahun 2010, tepatnya tanggal 15 Desember 2010, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) genap beroperasi sepuluh tahun. Perjuangan BBJ sebagai icon industri perdagangan berjangka Indonesia dalam kurun satu dekade itu, juga berbuah manis. BBJ yang saat ini dikenal dengan Jakarta Futures Exchange (JFX), telah memiliki gedung baru.

Dan istimewanya, JFX sudah memiliki sistem perdagangan yang termutakhir. Yang dapat diakses masyarakat dari berbagai tempat setiap saat. Sistem perdagangan JFX itu dikenalkan dengan JaFEST 3.

Sungguh istimewa kado di akhir tahun 2010, itu. Dan semoga kado istimewa tersebut menjadi bekal bagi kemajuan industri perdagangan berjangka komoditi dan pelaku sistem resi gudang Indonesia.

Akhir kata, Redaksi pun tak lupa mengatur ucapan; "Selamat Hari Natal 25 Desember 2010 dan Selamat Tahun Baru 2011. Salam! ▲"



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasihat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswanto, Katimin.
Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

13-15

Resi Gudang

BRI Sidrap Kucurkan

Pembiayaan SRG Bersubsidi



27

KIPRAH

H.M. Hasbi MSi.

SRG Mengubah

Paradigma Petani



Laporan Utama.....4-12

- Satu Dekade BBJ jadi JFX
- Amandemen 2UU Kado Akhir Tahun 2010
- Pandangan Umum 9 Fraksi DPR RI

Agenda16-17

Aktualita18-19

- LKB Tunggal Sama Saja Monopoli
- Laporan Keuangan Transparan Tingkatkan Kepercayaan Investor
- Palm Oil Convergence Indonesia Andalan CPO Dunia
- BBJ Beri Izin 5 Market Maker

Analisa20-21

- 2011 Komoditi Masih "Seksi"

Market22

- Harga Kopi Internasional Turun
- Permintaan Jagung Meningkatkan
- Harga Gula Diprediksi Naik

Info Harga23

Wawasan.....24-26

- Penting Edukasi Investasi

Satu Dekade BBJ Jadi JFX

Genap beroperasi sepuluh tahun pada 15 Desember 2010, BBJ berwajah baru. Layaknya seorang putri remaja, berbinar dan siap menantang masa depan. Apakah program-program yang terbaru dari BBJ mampu menjawab kebutuhan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia?

Harapan berkembangnya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai salah satu icon industri perdagangan berjangka Indonesia, semua terungkap pada pagelaran satu dekade BBJ yang diselenggarakan di gedung baru milik BBJ, 20 Desember 2010. Gedung baru milik BBJ itu terletak pada lantai 20 The City Tower, Jl. M.H Thamrin No. 81, Jakarta Pusat. Perhelatan yang bersejarah bagi perjalanan BBJ itu dihadiri Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, Kepala Bappebti, Deddy Saleh, sejumlah pejabat dan staf Kementerian Perdagangan, mantan Kepala Bappebti, pelaku industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia dan undangan lainnya.

Marie Elka Pangestu pada kesempatan itu meny-

ampaikan harapannya, “kami targetkan dalam 2 tahun ke depan BBJ harus bisa menjadi referensi harga komoditi untuk pasar Internasional.”

“Indonesia sebagai negara produsen sejumlah komoditi seharusnya dapat menjadi acuan harga. Namun, bursa berjangka Indonesia belum

dapat mengambil kesempatan tersebut,” kata Marie.

Oleh karena itu, Marie Pangestu menghimbau agar BBJ memiliki komitmen tinggi untuk memperdagangkan kontrak berjangka komoditi primer Indonesia. Himbauan itu juga disampaikan kepada pelaku komoditi di dalam negeri, agar melakukan transaksi



melalui bursa berjangka yang ada di tanah air.

"Partisipasi aktif para pelaku usaha di bursa berjangka tanah air akan mempercepat pencapaian cita-cita kita bersama. Yaitu, Indonesia sebagai negara acuan harga komoditi primer di pasar internasional," papar Marie Pangestu.

Anomali ekonomi

Sementara itu, Dirut BBJ Made Soekarwo, dalam sambutannya juga menyampaikan sejumlah harapan dan program kerja yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011. "Dalam usia sepuluh tahun ini, kami menandai perubahan orientasi yang dimulai dengan menempati gedung milik sendiri, mengubah logo baru dan memperkenalkan Bursa Berjangka Jakarta menjadi Jakarta Futures Exchange (JFX)."

"Dengan memperkenalkan JFX, diharapkan para pelaku dari pasar internasional lebih familier," tegas Made.

Terkait dengan sejumlah harapan yang dialamatkan pada JFX, Made Soekarwo, mengatakan, "JFX senantiasa berupaya maksimal untuk menjawab harapan semua pihak. Namun, tanpa dukungan semua pihak terutama pemerintah, perdagangan berjangka komoditi di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik."

"Tanpa dukungan pemerintah, akibatnya anomali ekonomi. Indonesia tidak akan pernah mempunyai sarana acuan harga. Sehingga, harga komoditi CPO mengacu ke Rotterdam dan Malaysia, harga kopi mengacu ke London, harga kakao ke New York, harga batubara ke Australia dan sebagainya," jelas Made.

Lebih jauh diungkap Made Soekarwo, untuk meningkatkan kemampuan para pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi, saat ini JFX telah menyediakan sistem perdagangan yang terbaru. "Ini merupakan prestasi yang tertinggi sepanjang satu dekade JFX beroperasi. Sistem perdagangan itu dikenal dengan JaFETS 3. Dengan sistem perdagangan yang on line ini, masyarakat dari manapun sudah bisa mengaksesnya."

"Saat ini pun, kami sedang mempersiapkan suatu fasilitas perdagangan yang mempermudah para market maker memberikan order jual dan beli selama jam perdagangan. Fasilitas itu disebut automatic price injection (API). Konsepnya API seperti tempat penukaran uang, yang memudahkan investor untuk melakukan pembelian atau penjualan karena tawaran harga sudah tersedia dengan spread yang cukup kecil," kata Made.

Sementara itu, Kepala Bappebti, Deddy Saleh, mengatakan, dengan fasilitas yang dimiliki JFX baik berupa gedung milik sendiri maupun sistem perdagangan yang terbaru, menjadi awal kebangkitan JFX dalam meningkatkan likuiditas. "Sehingga, keberadaan JFX dapat diakui dan dipercaya di dalam negeri dan dimata internasional."

Di sisi lain, Deddy Saleh, juga menekankan, agar JFX mengutamakan edukasi dalam berbagai bentuk terhadap masyarakat dan dunia usaha. "Tanpa edukasi akan sulit untuk bergerak mengembangkan bursa berjangka. Karena di masyarakat masih banyak yang belum mengenal manfaat bursa berjangka," jelas Deddy Saleh.

Kontrak Berjangka Syariah

Masih dalam rangkaian peringatan satu dekade JFX, dilakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kerjasama itu dinyatakan dengan MOU, dalam mengembangkan produk-produk berjangka berbasis Syariah Islam seperti Murabahah Komoditi.

Dikatakan Made Soekarwo, kerjasama ini didasari adanya keinginan perbankan untuk mengembangkan produk Murabahah Komoditi seperti yang sudah dilakukan bursa Malaysia. Yaitu, produk Murabahah Komoditi CPO. "Oleh karena itu, untuk mengembangkan kontrak berjangka berbasis syariah di Indonesia, JFX dan DSN mengambil inisiatif dengan melakukan kerjasama. Sebab, untuk mengembangkan kontrak berjangka berbasis syariah, pihak perbankan terutama Bank Indonesia harus terlibat. Jadi, JFX dan DSN mengambil inisiatif itu," papar Made.

Terkait dengan kerjasama JFX dan DSN mengembangkan kontrak berjangka berbasis syariah di Indonesia, Kepala Bappebti Deddy Saleh, mengatakan, "ini merupakan batu loncatan bagi JFX untuk melangkah lebih maju."

"Kami- Bappebti, pasti akan mendukung kerjasama itu. Dengan adanya kontrak berjangka berbasis syariah di Indonesia akan menghilangkan stigma bahwa bursa berjangka hanya sebagai sarana spekulasi," tegas Deddy Saleh.

Namun diingatkan Deddy Saleh, kerjasama itu harus segera ditindaklanjuti. Jangan berhenti hanya pada tandatangan MOU, setelah itu tidak ada perkembangan.

Sebagai ilustrasi, Murabahah Komoditi adalah akad jual-beli atas suatu barang. Dalam transaksi jual-beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas komoditi yang diperjualbelikan

termasuk harga pembelian. Termasuk besaran keuntungan yang akan diambil.

Murabahah Komoditi dalam teknis perbankan adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia komoditi dengan nasabah yang memesan untuk membeli komoditi tersebut. Sedangkan bank memperoleh keuntungan dari proses jual-beli yang disepakati bersama.

Target Transaksi 2011

Meski sudah memiliki fasilitas perdagangan berjangka yang cukup memadai, Dirut JFX, Made Soekarwo, tidak memasang target tinggi terhadap pencapaian volume transaksi ditahun 2011. "Kami berharap volume transaksi pada tahun 2011, khususnya kontrak berjangka multilateral mengalami kenaikan hingga sebesar 10 persen dari posisi saat ini."

"Kenaikan volume transaksi itu tentunya dari dukungan sistem JaFETS 3 yang sudah on-line dan adanya tambahan kontrak berjangka komoditi baru. Saat ini JFX sudah miliki tiga kontrak komoditi primer yakni emas, OLEIN, dan CPO. Tahun depan, kami berencana mengembangkan kontrak komoditi batubara dan timah," ujarnya.

Made Soekarwo, tidak memungkir kontribusi perdagangan multilateral masih sangat rendah baru sekitar 3 persen. Sedangkan sisanya merupakan transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA) dan penyaluran amanat nasabah ke bursa luar negeri (PALN).

Dari data yang diperoleh, total transaksi JFX sepanjang bulan Januari hingga November 2010, mencapai 4,98 juta lot. Transaksi itu terdiri dari 12.728 lot transaksi multilateral dan 4,96 juta lot OTC. Sedangkan pada tahun 2009, transaksi JFX sebesar 4,47 juta lot, yang terdiri dari 19.406 lot transaksi multilateral dan 4,45 juta lot transaksi SPA.

Dengan fasilitas sistem perdagangan yang sudah memadai tersebut, seharusnya JFX bisa memasang target volume transaksi yang lebih tinggi di tahun 2011. Apa lagi otoritas perdagangan berjangka sudah cukup mendukung, dengan kebijakan mematok para pelaku pasar bertransaksi multilateral minimal 5 persen dari total transaksi SPA.

Namun, masyarakat Indonesia khususnya industri perdagangan berjangka komoditi, sangat berharap lebih baik memasang target rendah tetapi pencapaiannya melampaui yang ditargetkan. Bisa! ▲

Amandemen 2 UU Kado Akhir Tahun 2010

Sembilan Fraksi DPR RI secara aklamasi menyetujui RUU amandemen PBK dan SRG. Persetujuan itu diungkap pada Rapat Paripurna DPR RI, 16 Desember 2010. Komisi VI DPR yakin pembahasan 2 RUU tidak berjalan alot, dan pada masa persidangan berikut sudah bisa disahkan menjadi undang-undang.

Dua Undang-Undang yang berada dibawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yakni UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan UU Sistem Resi Gudang, akan diamandemen oleh DPR RI. Keputusan politik DPR RI mengamandemen dua Undang-Undang tersebut dinyatakan pada Sidang Paripurna Kedua tahun 2010.

Dilakukannya amandemen UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang, agaknya menjadi kado di akhir tahun bagi industri perdagangan berjangka dan pelaku resi gudang. Betapa tidak, amandemen undang-undang itu khususnya UU Perdagangan Berjangka Komoditi sudah dinanti sejak beberapa tahun lampau. Karena ditenggarai UU No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah ketinggalan jaman. Akibatnya, industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air kurang mampu mengembangkan diri bersaing dengan bursa sejenis dari luar negeri. Di samping itu, perdagangan berjangka komoditi belum membawa dampak positif bagi perkembangan sektor riil.

Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, Pramono Anung, mengatakan, setelah mendengar pandangan umum fraksi-fraksi, dengan ini dipu-

tuskan DPR akan mengamandemen Undang-Undang No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan UU No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang. Selanjutnya, amandemen dua undang-undang tersebut menjadi hak inisiatif DPR RI.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, usai Sidang Paripurna berakhir, mengatakan, setelah sidang ini, langkah selanjutnya DPR menyampaikan surat kepada Presiden. Intinya, memberitahukan dan memintah pemerintah untuk turut dalam pembahasan undang-undang tersebut. "Kalau Presiden cepat merespon, pada masa persidangan selanjutnya akan dilakukan pembahasan."

"Target kami dari Komisi VI, satu kali masa persidangan undang-undang tersebut sudah selesai. Sehingga di Sidang Paripurna selanjutnya undang-undang tersebut sudah disahkan bersama pemerintah, diperkirakan bulan Februari 2011," jelas Aria Bima.

Hal yang senada juga disampaikan Kepala Bappebti, Deddy Saleh, "kita menyambut baik selesainya pembahasan dua UU tersebut sebagai inisiatif DPR." Selanjutnya, tambah Deddy, kami akan menunggu surat penugasan dari Presiden untuk Kemendag sebagai wakil pemerin-

tah dalam pembahasan selanjutnya.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, "kami akan melihat isi dari draf UU yang akan dibahas, apakah sesuai dengan kebutuhan industri dan pemerintah atau belum. Oleh karena itu, kami akan menyusun DIM (daftar inventasisasi masalah) yang akan dijadikan bahan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah.

Berbeda

Terkait dengan RUU No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang yang mengusulkan pendirian lembaga dana penjaminan, politikus muda PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, menyampaikan pendapatnya saat Sidang Paripurna berlangsung. Menurut Maruarar Sirait, "Pendirian Lembaga Dana Penjaminan Sistem Resi Gudang tidak perlu dilakukan, karena bisa digabungkan dengan lembaga sejenis di bidang perbankan- Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Terlalu banyak kita mendirikan lembaga tetapi tidak berjalan dengan efektif sesuai dengan diharapkan."

Ketika hal itu dikonfirmasi dengan Aria Bima, dengan tegas dikatakannya, Lembaga Dana Penjaminan Resi Gudang sangat bertolak belakang dengan LPS. "Dari judulnya saja sudah berbeda, di sana yang dijamin uang simpanan nasabah sedangkan di sini komoditi petani. Jadi, tidak mungkin itu bisa digabungkan."

"Lagi pula, mana mungkin orang LPS mau mengurus komoditi yang diagunkan. Karena, selain melakukan penjaminan, lembaga itu juga harus siap mencari pelaku pembeli akhir komoditi yang dijaminan," jelas Aria Bima. ▲

Pandangan Umum 9 Fraksi DPR RI

Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Desember 2010, menyetujui amandemen RUU No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan RUU N. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang. Amandemen dua UU itu menjadi inisiatif DPR. Bagaimana pandangan umum dari masing-masing Fraksi yang bercokol di Senayan, itu, berikut ini disarikan dari naskah aslinya;

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Juru bicara :
H. Ecky Awal Mucharam SE

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

Usulan RUU PBK, terdapat perluasan jenis definisi komoditi dari “barang dagangan” diusulkan berubah menjadi “semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi”. Perlu ditekan disini bahwa tujuan adanya perdagangan berjangka adalah sebagai sarana pengelolaan resiko sebagaimana sudah diuraikan pada UU PBK. Alasan mengapa perlu pengelolaan resiko dalam bentuk lindung nilai adalah karena komoditas cenderung rentan menghadapi berbagai gangguan baik dalam produksi maupun harga. Karena alasan itulah maka diadakan perdagangan berjangka dengan tujuan mulia untuk melindungi produsen dan konsumen dari ketidakpastian harga. Karena itu, maka dalam perluasan definisi komoditi dalam perdagangan

berjangka perlu mempertimbangkan aspek tersebut, jangan sampai perluasan definisi ini hanya sebagai sarana meningkatkan likuiditas dan volume perdagangan berjangka.

Dari fungsi perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko, pihak yang berkepentingan adalah hedgers, yaitu konsumen dan produsen yang melakukan lindung nilai untuk merencanakan tingkat konsumsi dan produksinya. Namun selain itu, juga terdapat speculators yang bertransaksi dengan tujuan mencari keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Keberadaan spekulators ini merupakan keniscayaan, oleh karena itu harus dipastikan bahwa UU yang sedang disusun ini dapat mencegah speculators melakukan tindakan spekulasi yang meningkatkan ketidakpastian harga.

jangan sampai perluasan definisi ini hanya sebagai sarana meningkatkan likuiditas dan volume perdagangan berjangka.

RUU Sistem Resi Gudang

Selama ini SRG belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Karena tidak adanya trust yang disebabkan belum adanya sistem penjaminan terhadap kualitas dan kuantitas komoditas di gudang. Oleh karena itu, perlu diadakan Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi (indemnity fund) yang berfungsi untuk menjamin hak pemegang resi gudang. Dengan adanya Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi ini diharapkan perbankan akan lebih banyak menyalurkan uang kepada sektor pertanian dengan resi gudang sebagai agunan. ▲

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Juru bicara :
Sukur H. Nababan

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

FPDI Perjuangan mencatat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam RUU PBK, yakni;

1. Kontrak berjangka harus memprioritaskan komoditas riil/fisik. Hal ini penting mengingat bagi komoditas riil/fisik, kemungkinan terjadi risiko lebih dapat diperhitungkan secara riil.

2. Dalam RUU PBK harus diatur secara tegas mengenai larangan afiliasi antar badan usaha yang mendirikan bursa berjangka.

3. Pemberian izin usaha lembaga kliring berjangka hanya kepada satu badan usaha yang terpisah dari bursa berjangka dan bersifat mandiri.

4. Batasan yang jelas terkait larangan afiliasi antar penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (perdagangan berjangka) dan Peserta Sistem Perdagangan Al-

2. Dalam RUU PBK harus diatur secara tegas mengenai larangan afiliasi antar badan usaha yang mendirikan bursa berjangka.

3. Pemberian izin usaha lembaga kliring berjangka hanya kepada satu badan usaha yang terpisah dari bursa berjangka dan bersifat mandiri.

ternatif (Pialang Berjangka). Batasan yang tegas dan jelas dinilai perlu agar penyimpangan serta peluang untuk penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat dapat seminimal mungkin dihindari di kemudian hari.

RUU Sistem Resi Gudang

FPDI Perjuangan mencatat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian;

(1) Agar supaya biaya-biaya tidak terlalu banyak dibebankan kepada petani khususnya biaya asuransi. Karena salah satu yang membuat SRG tidak berjalan adalah besarnya biaya yang dibebankan kepada petani.

(2) Bulog dalam hal ini harus memprioritaskan pembelian gabah petani termasuk petani yang menyimpan gabahnya di gudang, sebagai jaminan pemasaran bagi gabah petani serta mengantisipasi jatuhnya harga produk pertanian lainnya.

(3) Berkaitan dengan subsidi bunga bank maksimal 6 %, harus diingat agar tidak menggunakan sistem bunga pinjaman umum.

(4) Undang-undang ini harus bisa membuka akses bagi keterlibatan kelompok tani

(5) Peran Bappebti sebagai Badan Pengawas juga harus diperjelas, termasuk persyaratan menjadi pengelola gudang, sedangkan untuk pengujian kualitas sebaiknya bisa dilakukan oleh lembaga yang ada di daerah agar tidak memakan biaya tinggi.

(6) Setiap resi gudang yang diterbitkan dengan skema CMA (collateral management agreement) atau resi gudang yang diterbitkan di luar skema UU ini wajib didaftarkan di Pusat Registrasi resi gudang, tanpa hal ini maka database persediaan komoditas nasional tidak akan lengkap dan tidak bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan.

Berdasarkan isu pokok RUU SRG salah satunya adalah perlunya sebuah lembaga dana penjaminan ganti rugi. Isu ini berkembang setelah mencermati implementasi dari pelaksanaan resi gudang dilapangan ditemukan beberapa kendala dan kelemahan yaitu menyangkut belum tersedianya mekanisme jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau pelaku usaha bilamana pengelola resi gudang mengalami pailit sehingga pengelola gudang tidak dapat mengembalikan barang yang disimpan. ▲

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Juru bicara :
H. Iskandar D. Syaichu, SE

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

Fraksi PPP mendukung semangat RUU PBK dimana dinyatakan bahwa PBK adalah prasarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani, usaha kecil, dan produsen kecil agar dapat melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga. Petani dan produsen kecil pada umumnya tidak memiliki kemampuan secara langsung menggunakan sarana perdagangan berjangka, agar mereka dapat memanfaatkan, kepentingan mereka dapat diorganisasikan melalui koperasi, kelompok

pemasaran, atau pola kemitraan pengusaha dengan petani dan produsen kecil.

Fraksi PPP memahami bahwa PBK merupakan kegiatan bisnis yang kompleks sehingga perlu dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Selain itu, dalam menghadapi persaingan global dengan bursa komoditi negara lain, maka dinamisasi PBK nasional memang sangat diperlukan. Untuk itulah kiranya perlu dilakukan perubahan terhadap UU PBK.

RUU Sistem Resi Gudang

Latar belakang RUU SRG adalah karena sejak diundangkannya pada tanggal 14 Juli 2006, menghadapi kendala dilapangan.

Salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme penjaminan atau asuransi yang terjangkau bagi pelaku usaha, jika pengelola gudang mengalami pailit dan melakukan kelalaian dalam pengelolaan, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu diatur mekanisme penjaminan di dalam undang-undang tersebut.

Menurut kami, dengan adanya lembaga dana jaminan ganti rugi ini diharapkan para petani kecil tidak sulit untuk mendapatkan resi gudang guna memperoleh pembiayaan usahanya. Selain itu, dengan eksistensinya lembaga ini, maka diharapkan akan meningkat kepercayaan pelaku usaha, yaitu pemegang resi gudang, bank, dan pengelola gudang terhadap sistem resi gudang. ▲

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Juru bicara:
Ir. H.M Idris Laena

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

RUU PBK berfungsi untuk memberikan kepastian terhadap penerimaan negara atas setiap transaksi bursa, mendorong pembentukan sistem harga yang efisien dan transparan, mengatur seluruh transaksi komoditas yang terjadi di bursa maupun di luar bursa, melindungi kepentingan publik atas dasar kepastian mekanisme hukum dan kehadiran bursa yang sebagian besar memperdagangkan komoditas untuk negara agraris seperti Indonesia.

Selain itu, GOLKAR berpandangan bahwa semangat pembentukan RUU PBK ini adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi petani,

yang didasarkan pada realitas ekspor Indonesia yang masih bertumpu pada komoditas primer.

RUU Sistem Resi Gudang

FPG menegaskan, bahwa semangat pembentukan RUU SRG ini adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para petani. Melalui resi gudang ini, petani dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman pada saat harga komoditas jatuh (tunda jual) dan kemudian menjualnya kembali pada saat harga komoditas naik.

Selain itu penyusunan RUU SRG juga dimaksudkan untuk memperoleh solusi dalam mempe-

roleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Melalui resi gudang, akses untuk mendapatkan pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh bagi kalangan industri mikro dan kecil, termasuk didalamnya para petani. ▲

untuk memberikan kepastian terhadap penerimaan negara atas setiap transaksi bursa, mendorong pembentukan sistem harga yang efisien dan transparan, mengatur seluruh transaksi komoditas yang terjadi di bursa maupun di luar bursa, melindungi kepentingan publik atas dasar kepastian mekanisme hukum

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Juru bicara:
IR. E. Herman Khaeron, M.Si

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

Setelah berjalan sekitar 12 tahun, terlihat bahwa UU PBK tidak dapat lagi mengakomodir kepentingan di lapangan karena banyak ketentuan didalamnya yang sudah tertinggal. Harapan akan berkembangnya dengan pesat PBK sampai saat ini tidak tercapai karena transaksi komoditi hanya 2 % dari total transaksi yang ada di Indonesia. Padahal, Indonesia adalah negara penghasil komoditi dunia yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi karena sebagian besar hasilnya dijual ke pasar internasional. Sementara, bidang yang perkembangannya cukup pesat dalam

masyarakat saat ini adalah Sistem Perdagangan Alternatif yang perdagangannya dilakukan di luar bursa, seperti perdagangan forex, index, loco London dan lain-lain sebagai produk derivatif yang juga melakukan penarikan margin sebagai syarat utama dalam melakukan transaksi.

Di sisi lain, ada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang PBK, atau apabila dibandingkan dengan aturan atau sistem yang berlaku secara internasional, sudah tidak sesuai lagi, padahal sistem perdagangan berjangka ini sifatnya sudah cross border, tidak terbatas pada batas-batas wilayah suatu negara. Di beberapa negara, pengertian komoditi tidak hanya mencakup komoditi hasil pertanian, namun juga termasuk indeks dan produk-produk finansial. Ketidaksesuaian aturan dengan perkembangan terse-

but, jika tidak segera diantisipasi, maka akan menghambat perkembangan PBK di Indonesia.

RUU Sistem Resi Gudang,

Setelah diundangkannya UU SRG, ditemukan beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan SRG, antara lain tidak tersedianya mekanisme jaminan atau asuransi yang terjangkau bagi pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan sehingga tidak melaksanakan kewajiban dalam mengembalikan barang yang di simpan dalam gudang dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam resi gudang. Jaminan pelaksanaan (performance guarantee) bagi pelaksanaan kewajiban pengelola gudang antara lain diperoleh dengan mewajibkan pengelola gudang untuk memiliki jaminan asuransi (insurance bond). ▲

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Juru bicara :
Drs. H. Ibnu Multazam

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

Sejumlah point penting yang perlu diperhatikan pada RUU adalah;

(1) FPKB memandang bahwa amandemen atau RUU PBK dapat berdampak positif bagi petani dan pengusaha kecil karena dapat terhindar dari risiko dari ketidakpastian atau fluktuasi harga. Selain itu, adanya transparansi bagi harga produk pertanian tidak hanya menguntungkan bagi petani, tetapi juga menguntungkan para prosesor, pengeksportir dan konsumen.

(2) Pembahasan RUU ini harus juga diperbandingkan dengan regulasi sejenis dari beberapa negara yang lebih maju pengaturannya dalam rangka mencari best practise implementasi RUU PBK tersebut.

(3) FPKB berpendapat bahwa amandemen UU PBK memang diperlukan adanya perluasan pengaturan berkaitan berbagai pengertian dalam PBK. Perluasan pengaturan dan penambahan beberapa definisi seperti, pengertian dari PBK, pengertian Komoditi, tentang tugas dan fungsi Bappebti, pengertian baru tentang Kontrak Derivatif, pengertian tentang Opsi, pengertian tentang Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka.

(4) FPKB berpandangan bahwa adanya penambahan pengaturan tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka

yang berkaitan dengan sistem transaksi elektronik di dalam RUU ini sudah sejalan dengan perkembangan ke depan transaksi perdagangan berjangka yang terjadi di berbagai bursa berjangka di dunia.

(5) FPKB sangat mendukung terhadap rencana peningkatan wewenang Penyidik Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Bappebti dalam melaksanakan fungsi Pemerintah dan Penyidik terhadap setiap pihak yang diduga, baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan atau terlibat pelanggaran terhadap ketentuan UU ini. Di samping itu pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana dalam UU ini juga bisa meminimalisir perbuatan yang melawan hukum.

RUU Sistem Resi Gudang

Point penting yang perlu diperhatikan pada RUU ini adalah;

(1) FPKB berpendapat bahwa RUU SRG ini dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional terutama dalam memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pengusaha kecil dan menengah serta petani dan kelompok tani untuk dapat mengakses permodalan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pembiayaan usaha mereka.

(2) FPKB berpendapat bahwa dengan dilakukannya penyempurnaan pengaturan dan regulasi tentang SRG ini dapat membuat integritas sistem resi gudang semakin baik, sehingga pengaturan hubungan antara para peserta yaitu penyimpanan, pengelola gudang dan bank dapat berjalan dengan optimal.

(3) FPKB melihat bahwa RUU SRG ini telah disusun dengan sungguh-sungguh untuk

mengatur berbagai hal mendasar dalam pelaksanaan SRG dengan adanya pengaturan mengenai Kelembagaan seperti tugas dan wewenang Badan Pengawasan, Pengelola Gudang, Lembaga Penilai Kesesuaian maupun Pusat Registrasi

(4) FPKB memandang bahwa adanya pola koordinasi melalui pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengaturan, pembinaan, dan pengawasan SRG di dalam RUU ini menunjukkan semangat desentralisasi peran dan tanggung jawab untuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SRG ini sangat besar. Koordinasi lintas sektor dan wilayah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini sangat diperlukan, guna menghindari tumpang tindih peran yang hanya akan mengakibatkan munculnya in-efektifitas dan in-efisiensi.

(5) FPKB berpendapat terhadap usulan Bab baru mengenai Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi di dalam batang tubuh RUU SRG perlu diperhatikan, juga masukan terhadap kajian yang komprehensif, seperti adanya best practise dari negara lain yang juga mengatur ketentuan mengenai hal tersebut di atas. Sehingga tujuan daripada RUU ini dalam upaya melindungi pengguna SRG yang sebagian besar adalah petani ini dapat tercapai. Hal ini juga menunjukkan bahwa RUU ini tidak semata-mata hanya untuk mengakomodir tuntutan kebutuhan dunia usaha saja, yang trend-nya selalu mengikuti mekanisme pasar.

(6) FPKB akan mendukung keberadaan Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi tersebut selama tidak memberatkan bagi semua stakeholders yang terlibat dalam SRG. Terlebih lagi mengenai rencana penetapan pungutan kontribusi bagi Pengelola Gudang pada saat pertama kali menjadi peserta, dan juga besaran uang jaminan atas setiap Barang yang disimpan tersebut betul-betul bisa dilakukan secara baik dan benar dan sebanding dengan peningkatan stabilitas dan kualitas implementasi SRG dilapangan nantinya.

(7) FPKB sangat mendukung dengan adanya peraturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi hukum yang tegas seperti yang diatur dalam RUU SRG. ▲

2. Dalam RUU PBK harus diatur secara tegas mengenai larangan afiliasi antar badan usaha yang mendirikan bursa berjangka.

3. Pemberian izin usaha lembaga kliring berjangka hanya kepada satu badan usaha yang terpisah dari bursa berjangka dan bersifat mandiri.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Juru Bicara :
H. Nasril Bahar, SE

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

FPAN menyetujui untuk dilakukan perubahan UU PBK dengan beberapa catatan :

1. Definisi Komoditi perlu diatur secara komprehensif, sehingga tidak hanya menyangkut komoditi pertanian dan pertambangan, namun juga termasuk komoditi tidak terwujud.

2. Perlunya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik Perdagangan Berjangka di luar bursa. Pengaturan perdagangan di luar bursa (OTC) diperlukan guna mencegah spekulasi yang terlalu berlebihan. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan penarikan margin oleh suatu perusahaan yang tidak mempunyai izin perlu ditertibkan.

3. Peningkatan perlindungan bagi masyarakat dari praktik Perdagangan Berjangka tanpa izin. Masyarakat ha-

rus dilindungi dari maraknya kegiatan menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan perdagangan berjangka yang berisiko tinggi rentan penipuan.

4. Perlu dilakukan Demutualisasi Bursa Berjangka. Melalui demutualisasi diharapkan lembaga bursa berjangka menjadi suatu entitas bisnis yang dapat mengundang investor asing dalam dan luar negeri, sehingga memiliki modalan yang baik, kualitas produk yang baik dan variasi produk yang lengkap, infrastruktur, serta tata kelola yang baik dapat meningkatkan daya saing global secara konsisten.

5. Perlu dilakukan optimalisasi Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka. Keberadaan asosiasi ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan para perusahaan industri PBK dengan pihak otoritas.

6. Dengan diterbitkannya UU No. 11/2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU PBK ini hendaknya juga mengatur tentang transaksi perdagangan berjangka melalui elektronik.

7. Fraksi PAN mendukung pemisahan Bappebti selaku otoritas di bidang PBK dari Kementerian Perdagangan. Dengan pemisahan ini lebih berkoncentrasi dalam pembuatan kebijakan pengembangan komoditi primer dan pengawasan kegiatan di bidang PBK.

RUU Sistem Resi Gudang

Fraksi PAN mendukung dilakukannya Perubahan UU SRG dengan beberapa catatan :

1. UU SRG harus dapat menjadi pedoman dan dasar keberadaan Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi. Pembentukan lembaga tersebut untuk mewadahi jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan, mengurnagi risiko pengelola gudang jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam resi tersebut. Selain itu, pembiayaan dari perbankan juga akan dilindungi. Lembaga ini akan memberikan ganti rugi kepada petani dan perbankan jika nantinya pengelola gudang mengalami kebangkrutan.

2. Fraksi PAN menegaskan agar RUU ini dapat mengatasi aspek legalitas yang mendukung Resi Gudang sebagai instrumen keuangan yang diperdagangkan. Pengaturan dalam RUU ini harus bersifat integratif dan komprehensif sehingga dapat mengatasi kemungkinan masalah-masalah yang terjadi.

3. Fraksi PAN mengharapkan agar RUU ini dapat mengatasi masalah fluktuasi tingkat bunga yang cenderung tidak stabil, sehingga dapat memperoleh dukungan dari perbankan.

4. RUU SRG harus dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, karena kewenangan yang dimiliki menyangkut pengelolaan dana dari masyarakat. ▲

beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan SRG, antara lain tidak tersedianya mekanisme jaminan atau asuransi yang terjangkau bagi pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Juru bicara :
Erik Satrya Wardhana, SE

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

Fraksi Partai Hanura perlu memberi catatan penting RUU PBK, diantaranya;

(1) Perlunya kemudahan akses bagi masyarakat dalam PBK, sehingga petani kecil memiliki kemampuan langsung dalam menggunakan sarana perdagangan berjangka. Hal ini menjadi penting, mengingat dalam penjelasan umum RUU PBK, keterlibatan masyarakat dalam menggunakan sarana ini harus berkelompok atau dengan kumpulan maupun asosiasi

(2) Perlunya sosialisasi mengenai PBK. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa dalam upaya mewujudkan kegiatan perdagangan yang teratur, wajar, efisien, dan efektif semua pelaku harus memiliki pengetahuan tentang komoditi, berbagai peraturan dan tata cara perdagangan yang berlaku di bursa berjangka, memiliki modal cukup, bebas untuk masuk dan keluar

pasar, dan tidak melakukan kegiatan persekongkolan. Dengan demikian mekanisme pasar dapat berjalan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, dapat terlaksana secara wajar, dan terhindar dari penyimpanan.

RUU Sistem Resi Gudang

Banyak faktor yang masih menghambat SRG, diantaranya masalah kepastian hukum yang tidak memberikan jaminan yang cukup bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung implementasi SRG. Selain itu, RUU SRG diharapkan dapat menjadi faktor pendorong mobilisasi kredit dan berbagai fasilitas pembiayaan lainnya ke sektor pertanian dan pedesaan, memperkecil fluktuasi pembiayaan lainnya ke sektor per-

tanian dan pedesaan, memperkecil fluktuasi harga komoditi, menekan kerugian setelah panen serta meningkatkan mutu komoditas karena sistem penyimpanan yang baik. Resi gudang harus dapat juga digunakan sebagai aset acuan pada kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka yang ada sehingga meningkatkan nilai kompetisinya. Resi gudang ini dapat dijadikan komoditas perdagangan sepanjang tersedianya semua informasi penting yang dibutuhkan untuk terlaksananya transaksi antara penjual dan pembeli. ▲

diharapkan dapat menjadi faktor pendorong mobilisasi kredit dan berbagai fasilitas pembiayaan lainnya ke sektor pertanian dan pedesaan, memperkecil fluktuasi pembiayaan lainnya ke sektor pertanian dan pedesaan, memperkecil fluktuasi harga komoditi, menekan kerugian setelah panen serta meningkatkan mutu komoditas karena sistem penyimpanan yang baik.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

Juru bicara :
Rindoko Dahono Wingit, SH, M.Hum

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

Beberapa catatan dari Fraksi Partai Gerindra, yaitu;

1. Perlunya kajian dan penjelasan yang sangat mendalam mengenai definisi komoditi terutama mengenai bentuk dari 'jasa, hak dan kepentingan lainnya' sehingga dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan dan menyebabkan kerugian di masyarakat.

2. Adanya fasilitas online trading sistem yang diselenggarakan oleh

bursa berjangka atau penyelenggara sistem perdagangan alternatif perlu dipikirkan secara mendalam, sehingga dapat mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pialang dalam transaksi dana nasabah dengan rekayasa teknologi informasi.

3. Diharapkan penerapan sistem di PBK dikelola untuk memajukan perekonomian nasional

4. Perlu adanya sanksi terhadap pihak-pihak yang memberikan informasi yang salah dan menyesatkan, terkait atas harga, produksi, volume perdagangan dan prediksi-prediksi mengenai komoditas terkait, agar masyarakat tidak dirugikan dan ikut serta dalam PBK dengan informasi yang tepat tanpa adanya penambahan informasi yang menyesatkan.

5. Sanksi harus memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

RUU Sistem Resi Gudang

Fraksi Partai Gerindra memandang penting beberapa hal di bawah ini;

1. UU SRG sejak tahun 2006 tidak memihak kepada petani dan sektor riil.

2. SRG bersifat transaksi derivatif, dimana hubungan transaksi derivatif cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

3. Sistem ini memaksa arus uang yang beredar justru tidak berada pada sektor riil yang seharusnya berpotensi memproduksi barang dan jasa.

4. SRG ini memperbanyak mekanisme keuangan modern yang pada hakikatnya hanya menambah panjang labirin arus uang.

5. Mendekatkan sektor pertanian nasional dengan liberalisasi ekonomi berbasis spekulasi yang sangat berpotensi melahirkan moral hazard.

6. Akan melemahkan peran Bulog dalam tugas memastikan ketersediaan logistik nasional. ▲

BATOLA

Kelola Gudang SRG

Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, meluncurkan sistem resi gudang (SRG) setelah berdirinya gudang pangan dan terealisirnya sarana pergudangan lainnya termasuk alat pengering gabah-dryer. Fasilitas pergudangan BATOLA yang berdiri di Desa Putik Luar, Mandastana, itu, merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2009, Kementerian Perdagangan menyalurkan dana stimulus fiskal untuk pembangunan gudang pangan SRG sebanyak 41 unit gudang di 34 kabupaten.

Pengelola Gudang SRG BATOLA yang ditunjuk yakni PT. Bandha Graha Reksa menerbitkan tiga resi gudang atas nama Kelompok Tani Kampung Tengah, Desa Barunai Baru, Kecamatan Anjir Pasar, berupa gabah sejumlah 7,87 ton, dengan nilai komoditi sebesar Rp 39,39 juta. Resi gudang kedua diterbitkan atas nama Lumbang Karya Bersama, Desa Pantai Hambawang, berupa gabah sejumlah 3,83 ton, dengan nilai barang Rp19,17 juta. Resi gudang yang ketiga, diserahkan pada KUD BASUNONDO, Desa Danda Jaya Rantau Baduah, berupa gabah sejumlah 14,46 ton, dengan nilai barang Rp 72,32 juta.

"Tahun 2010, pemerintah melalui dana APBN-P juga menyalurkan bantuan kepada pemerintah daerah yang memiliki gudang pangan SRG dengan penyediaan alat pengering gabah. Alat pengering gabah ini merupakan fasilitas yang harus ada di gudang SRG, agar kualitas komoditi gabah yang dimasukkan ke gudang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan SNI. Di sisi lain, dengan kualitas yang lebih baik harga gabah juga akan lebih tinggi dan tahan lebih lama," demikian antara lain diutarakan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Deddy Saleh, saat memberi sambutan peluncuran gudang SRG BATOLA, 17 Desember 2010.

Peluncuran gudang pangan SRG BATOLA juga dihadiri Bupati BATOLA, Hasanuddin Murad, Ketua DPRD BATOLA, Husain Ahmad, Sekjen Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Par-

man, sejumlah pimpinan perbankan daerah, serta petani yang tergabung dalam Gapoktan atau koperasi.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, berdasarkan UU No. 9 tahun 2006, SRG merupakan salah satu instrument efektif untuk mengatasi kesulitan para pelaku usaha, terutama kelompok tani dan UKM yang selama ini menghadapi masalah dalam memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Karena, kelompok usaha tani tersebut tidak memiliki asset tetap untuk dijadikan sebagai agunan.

"Aset yang berharga bagi petani adalah komoditi hasil panen, oleh karenanya melalui undang-undang itu komoditi petani bisa dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh modal kerja," kata Deddy Saleh.

Di samping itu, tambahnya, dengan komoditi dimasukkan ke gudang SRG, petani bisa melakukan tunda jual pada saat panen raya. Dengan demikian petani bisa menentukan harga terbaik akan komoditi yang dihasilkan. "Dengan SRG ini, mendorong petani produsen menjadi petani pebisnis. Petani yang dapat memperdiksi kapan akan melakukan musim tanam dan kapan melakukan penjualan dengan harga yang terbaik."

"Dukungan pemerintah dalam pengembangan SRG tidak terbatas pada pembangunan fisik gudang, melainkan juga memberi keringanan bunga bank berupa subsidi bunga. Pemerintah pada tahun 2010 telah menetapkan subsidi bunga bank untuk pembiayaan SRG sebesar 6 %. Sehingga selisih tingkat bunga sub-

sidi SRG dengan suku bunga bank merupakan tanggungan pemerintah. Dengan demikian, petani yang menggunakan skema subsidi SRG dapat menikmati pembiayaan dengan bunga relatif rendah," jelas Deddy.

Menurut Deddy Saleh, membangun gudang pangan seperti yang ada di BATOLA merupakan pekerjaan yang mudah. Tetapi, tugas yang lebih berat adalah menciptakan sistem. "Gudang SRG BATOLA sudah menerbitkan resi gudang, bukan itu tanda keberhasilan. Melainkan ukuran keberhasilan gudang pangan SRG adalah meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani," jelas Deddy.

Senada dengan itu, Bupati BATOLA, Hasanuddin Murad, mengatakan, dalam skema pembiayaan SRG yang lebih penting adalah meningkatnya daya tawar petani dan bukan berisi atau tidaknya gudang.

"Kadang, petani dihadapkan pada situasi yang tanpa pilihan. Saat musim panen gabah harga selalu jatuh, sementara petani perlu biaya. Sehingga dengan tingkat harga rendah petani dengan terpaksa menjual gabahnya. Jadi, dengan skema SRG ini petani tidak harus menjualnya tetapi simpan saja di gudang. Dan sebaliknya, kalau memang harga saat panen tinggi gabah tidak perlu disimpan, langsung di jual saja," tutur Murad

"Saya sangat mengharapkan pembiayaan SRG ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan usaha kecil menengah dan mikro sekaligus mendorong perekonomian daerah," imbuh Murad. ▲



BRI Sidrap

Kucurkan Pembiayaan SRG Bersubsidi

Sistem resi gudang semakin memasyarakat dengan terlibatnya berbagai lembaga pembiayaan.

Sejak tahun 2008 skema pembiayaan sistem resi gudang (SRG) diimplementasikan di tanah air, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah digadang-gadang sebagai pionier dalam pembiayaan komoditi itu. Mengingat BRI merupakan bank plat merah yang memiliki jaringan luas hingga ke seluruh pelosok nusantara. Namun, realisasinya baru bisa terlaksana pada 26 November 2010, dari BRI cabang Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

Dari data Pusat Registrasi SRG, PT Kliring Berjangka Indonesia, BRI Sidrap mengucurkan pembiayaan SRG untuk dua resi gudang dengan senilai Rp 775,49 juta. Atau setara dengan nilai

komoditi gabah yang dijaminan sebesar Rp 1,108 miliar.

Pembiayaan BRI yang dikucurkan kepada petani Sidrap tersebut, merupakan pembiayaan resi gudang dengan pola subsidi yang sudah diprogramkan pemerintah. Dengan demikian, BRI Sidrap juga merupakan bank pemerintah yang pertama kali memanfaatkan pola subsidi tersebut.

Petani Sidrap yang tergabung di Koperasi Celebes Mandiri, menerima dua resi gudang yang diterbitkan oleh PT Pertani, Sidrap. Resi gudang yang pertama dengan nilai Rp 916,77 juta, atau setara dengan komoditi gabah diagunkan sebanyak 269,64 ton. Ketika gabah dimasukan ke gudang SRG, harga gabah berada pada posisi Rp 3.400 per kilogram.

Resi gudang kedua yang diterima Koperasi Celebes Mandiri, senilai Rp 191,07 juta, atau setara dengan komoditi gabah yang diagunkan sebanyak 59,71 ton. Dengan posisi harga gabah sebesar Rp 3.200 per kilogram.

Dengan nilai komoditi gabah yang diagunkan tersebut, Koperasi Celebes Mandiri menerima pembiayaan dari BRI Sidrap untuk resi gudang yang pertama sebesar Rp 614,74 juta. Atau, sebesar 70 persen dari nilai komoditi gabah Rp 916,77 juta. Sedangkan dari resi gudang yang kedua, Koperasi Celebes Mandiri menerima pembiayaan BRI sebesar Rp133,75 juta atau 70 persen dari nilai komoditi gabah sebesar Rp 191,07 juta.

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sutriyono Edi, mengatakan, pembiayaan resi gudang dengan subsidi bunga oleh BRI Sidrap itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh bank pemerintah. "Sebelumnya memang BRI sudah menyalurkan kredit resi gudang tetapi tidak menggunakan pola subsidi bunga."

“Masuknya BRI sebagai bank pemberi kredit resi gudang dengan pola subsidi bunga, diharapkan ke depan semakin meyakinkan perbankan lainnya untuk turut serta membiayai resi gudang,” ujar Sutriyono.

lebih jauh dikatakan Sutriyono Edi, dengan demikian saat ini sudah ada empat bank yang terlibat dalam pembiayaan resi gudang. Keempat bank tersebut yakni Bank Jawa Timur (Jatim), Bank Jabar Banten, dan Bank BPD Kalsel, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pembiayaan resi gudang dari ketiga bank di luar BRI mencapai Rp1,38 miliar dengan nilai barang yang disimpan dalam gudang mencapai Rp1,98 miliar. Dengan demikian total pembiayaan resi gudang dari keempat bank termasuk BRI menjadi Rp2,15 miliar dengan nilai barang mencapai Rp2,89 miliar.

“Masuknya BRI sebagai bank pemberi kredit resi gudang dengan pola subsidi bunga, diharapkan ke depan semakin meyakinkan perbankan lainnya untuk turut serta membiayai resi gudang”

Pembiayaan PKBL

U paya mendukung dan mengembangkan SRG diberbagai daerah, PT Kliring Berjangka Indonesia (persero) turut menyalurkan pembiayaan resi gudang. Pembiayaan yang dilakukan BUMN ini, sejak 21 April hingga 24 September 2010, KBI sudah menyalurkan sebesar Rp 1,54 miliar. Atau, sekitar 70 persen dari total nilai komoditi yang diagunkan yakni sebesar Rp 2,2 miliar.

Pembiayaan yang dilakukan KBI itu, berasal dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.

Dirut KBI, Surdiyanto Suryodarmodjo, mengatakan, bahwa pihak pun mengenakan bunga atas pembiayaan resi gudang tersebut. Namun besarnya reaktif kecil, yakni sebesar 6 persen atau sama dengan besaran suku bunga dalam skema subsidi yang ditetapkan pemerintah.

“Mayoritas pembiayaan itu sudah dilunasi oleh petani penerima pembiayaan KBI. Bahkan, sebagian pelunasannya dilakukan sebelum jatuh tempo,” jelas Surdiyanto.

Pada dasarnya, tambah Surdiyanto, dengan program ini kami ingin memberi contoh bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan

lainnya, bahwa secara ekonomis pembiayaan SRG ini cukup memberi keuntungan dan memiliki potens bisnis.

Sementara itu, Kepala Biro Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriyono Edi, mengatakan, petani maupun kelompok tani yang melakukan tunda jual menggunakan skema sistem resi gudang terbukti telah memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dia memberi contoh Kelompok Tani Wargo Tani di Kabupaten Banyuwangi yang memperoleh keuntungan sebesar Rp 287,38 per kilogram, bahkan Kelompok Tani Jaya Tani di Kabupaten Indramayu mendapat untung Rp 615 per kilogram.

Keuntungan tersebut diperoleh setelah nilai penjualan komoditas dikurangi biaya pengelolaan gudang sebesar Rp50 per kg dan beban bunga PKBL serta pembebanan hak jaminan Rp12 per kg. Penerbitan resi gudang sejak diluncurkannya pada 2008 hingga November 2010 sudah dilakukan di delapan daerah yaitu Indramayu, Karanganyar, Jombang, Banyumas, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, dan Gowa untuk komoditas gabah dan jagung. ▲



Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Kepala Bappebti Deddy Saleh mengikuti dan menyaksikan rangkaian acara satu dekade BBJ yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2010. Satu dekade BBJ juga ditandai dengan perpindahan gedung milik BBJ ke The City Tower, Lt. 20 Jl. MH. Thamrin, JakPus. Dalam kesempatan itu Direksi BBJ dan Kepala Bappebti melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah. Menteri Perdagangan juga mencermati sistem perdagangan BBJ, JaFES 3, selanjutnya dilakukan jumpa pers. 20 Desember 2010



Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, didampingi Kepala Bappebti dan sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan mengunjungi gudang pangan Sistem Resi Gudang di Desa Tirtanirmolo, Kasihan, Bantul, DI. Yogyakarta. 18 Desember 2010



Sekjen Kementerian Perdagangan Ardiansyah Parman turut menyaksikan pengoperasionalan gudang pangan Sistem Resi Gudang di Desa Puntik Luar Mandastana, Barito Kuala, Kaltim. 17 Desember 2010



Kepala Bappebti, Deddy Saleh dan Dirut PT. Pertani (Persero), menjadi nara sumber dialog interaktif Sistem Resi Gudang di Metro TV. PT. Pertani merupakan salah satu pelaku sistem resi gudang yang mengembangkan skema pembiayaan tunda jual komoditi di beberapa daerah. 10 Desember 2010

LKB Tunggal Sama Saja Monopoli

U sualan lembaga kliring berjangka (LKB) tunggal diindustri perdagangan berjangka komoditi Indonesia pada draf revisi undang-undang perdagangan berjangka komoditi versi DPR RI, mengundang reaksi dari berbagai pihak. Hal itu terkait dengan rencana DPR RI yang akan mengamendemen UUU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, pada awal tahun 2011.

Dalam draf revisi UUU Perdagangan Berjangka Komoditi versi DPR RI, pada pasal 25, tentang lembaga kliring berjangka, di ayat 3, berbunyi; 'izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada satu

badan usaha yang terpisah dari bursa berjangka dan bersifat mandiri.'

Terkait dengan draf tersebut, Kepala Bappebti Deddy Saleh, dengan tegas mengatakan, nantinya kami akan membahas hal itu dengan DPR. Ini juga sifatnya masih draf dan usulan DPR.

"Tetapi yang jelas, bila lembaga kliring berjangka hanya ada satu sama saja monopoli. Dan ini akan bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha dari KPPU," jelas Deddy Saleh.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, jika hanya ada satu lembaga kliring berjangka juga bertentangan dengan international business practice. Mari kita lihat di beberapa negara Asean,

di Thailand, Singapura dan Malaysia, lembaga kliring berjangka menyatu dengan bursa berjangkanya.

Sementara itu, menurut Anggota Komisi VI DPR, Hendarman Supratikno, lembaga kliring berjangka sebaiknya hanya ada satu dan berbadan hukum BUMN.

Menurut politisi PDI Perjuangan, ini, dasar pemikirannya peran negara pada industri perdagangan berjangka tetap terpelihara. Sehingga bisnis dengan komponen spekulasi yang cukup tinggi dapat terus dimonitor.

"Sisi lain, memberikan perlindungan tambahan bagi investor dan memupuk kepercayaan publik. Karena lembaga kliring berjangka tersebut dimiliki oleh BUMN," ujar Hendarman. ▲

Laporan Keuangan Transparan Tingkatkan Kepercayaan Investor

P enerapan laporan keuangan perusahaan pialang berjangka yang mengacu pada revisi Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50/2006 dan PSAK 55/2006, berpotensi menggairahkan industri perdagangan berjangka Indonesia. Namun, konsekuensinya berdampak pada pengurangan modal bersih disesuaikan (MBD).

Menurut Arry Syarief, akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi, menilai, terdapat sejumlah perbedaan antara PSAK 50 dan 55 dengan pedoman akuntansi pialang berjangka

yang ditetapkan oleh Bappebti. Perbedaan tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni surat berharga dan deposito berjangka.

Dalam peraturan Bappebti, sesuai dengan SK No. 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003, tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka dan SK No.47/BAPPEBTI/KP/IX/2003, tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka, hanya ada tiga kategori surat berharga dan tidak ada kategori loan and receivable.

"Sedangkan dalam PSAK ada empat kategori termasuk kategori baru loan and receivable. Selain dapat mengurangi MBD, ada juga yang dapat

menambah MBD, tergantung pada besar kecilnya suku bunga efektif serta kondisi pasar," jelas Arry.

Sementara itu, Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia, Tris Sudarto, berpendapat, penerapan PSAK 50 dan 55 berdampak pada lebih transparannya laporan keuangan perusahaan khususnya para anggota kliring. Hanya saja, sedikit lebih rumit dari biasanya.

"Laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 50 dan 55 sesuai dengan standar internasional yakni International Financial Reporting Standards (IFRS), sehingga lebih mudah dipahami investor, yang memudahkan masuknya investor ke industri perdagangan berjangka," kata Tris Sudarto. ▲

Palm Oil Convergence Indonesia Andalan CPO Dunia

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menjadi pembicara utama pada 6th Indonesian Palm Oil Conference and 2011 Price Outlook di Westin Resort Nusa Dua, Bali. Acara ini berlangsung 1 - 3 Desember 2010. Konferensi ini merupakan agenda tahunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan merupakan konferensi ke-6 dan telah menjadi event penting bagi perkelapasawitan dunia. Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 1000 peserta dari berbagai negara yang merupakan stakeholder industri kelapa sawit.

Agenda konferensi antara lain membahas manfaat sosial ekonomi dan perkembangan penerapan teknologi produksi dan manajemen usaha kelapa sawit yang sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability). Dan, perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia

di bidang industri kelapa sawit baik di masa kini maupun di masa mendatang. Di samping itu, membahas perkembangan permintaan dan pasokan serta trend harga minyak kelapa sawit.

Mari Elka Pangestu dalam keterangannya menjelaskan, bahwa dengan kenaikan harga CPO dunia berimbas kepada naiknya harga minyak goreng. Oleh karena itu, pemerintah sedang menyusun mekanisme program minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan sederhana. Harganya lebih murah dari minyak goreng kemasan yang beredar di pasar.

Terkait dengan pengembangan industri minyak kelapa sawit di dalam negeri, Mari Pangestu, menyatakan harapannya, "para stakeholder minyak kelapa sawit sebaiknya mencari solusi bersama untuk memenuhi objectivitas dari standar CPO dunia."

Meningkat

Sementara itu, produksi sawit dunia pada tahun 2011 diperkirakan akan meningkat 3 - 3,1 juta metrik ton meski masih dibayang-bayangi masalah iklim. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia masih menjadi andalan peningkatan produksi ini.

Analisis Komoditi Global dari Oil World, Thomas Mielke, mengatakan, "perkiraan saya, tahun 2011 produksi dunia tumbuh 3 - 3,1 juta ton. "Dari peningkatan produksi itu, Indonesia diharapkan bisa menopang tambahan produksi sebanyak 2,1 juta ton. Sementara Malaysia diperkirakan akan menambah produksi sampai 700.000 ton."

Menurut Thomas Mielke, peningkatan produksi sawit harus bisa terjadi pada tahun 2011. Karena masalah iklim juga melanda pada komoditas substitusi sawit lainnya seperti rape oil, minyak bunga matahari dan termasuk minyak keledai. ▲

BBJ Beri Izin 5 Market Maker

Meningkatkan likuiditas perdagangan berjangka komoditi, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) telah menyelesaikan dan melengkapi sistem perdagangan terbarunya. Pada akhir November 2010, pelaku pasar yang bertransaksi di BBJ sudah bisa menggunakan JAFeTS 3 dengan Akses Pasar Langsung (APL). Dengan APL, nasabah pun dapat melakukan transaksinya ke BBJ melalui web.

Di samping itu, dengan APL memungkinkan Anggota Bursa mengembangkan sistemnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan akan fitur yang diperlukan sendiri atau nasabahnya. Dengan kelengkapan sistem perdagangan ini, Pialang Berjangka juga diharapkan berperan lebih aktif dalam menarik minat lindung nilai masyarakat ke instrumen

berjangka yang dimiliki BBJ.

Dengan digunakannya JAFeTS 3, BBJ meninggalkan sistem perdagangan yang sebelumnya digunakan yakni JAFeTS 2. Sistem perdagangan BBJ ini sebelumnya sudah digunakan sekitar 5 tahun.

Selain menyediakan sistem perdagangan secara on line, BBJ juga telah menyetujui sebanyak lima perusahaan sebagai penggerak pasar (market maker). Atau, pelaku pasar yang bersedia memasang order beli dan order jual setiap saat selama

jam perdagangan dengan selisih beli dan jual tertentu. Lima perusahaan tersebut terdiri dari tiga perusahaan pialang berjangka dan dua perusahaan pedagang berjangka. ▲

Market Maker BBJ

No. PIALANG

1. Premier Equity Futures
2. Mahadana Asta Berjangka
3. Askap Futures

JENIS KONTRAK

- Kontrak Index Emas (KIE)
- Kontrak Index Emas (KIE)
- Kontrak Gulir Emas (KGE)
- Kontrak Gulir Emas USD (KGEUSD)
- Kontrak Index Emas (KIE)
- Kontrak Gulir Emas (KGE)
- Kontrak Gulir Emas USD (KGEUSD)

No. PEDAGANG

1. Monex Investindo
2. Sentra Arta Maxima

JENIS KONTRAK

- Kontrak Gulir Emas USD (KGEUSD)
- Kontrak Index Emas (KIE)
- Kontrak Gulir Emas (KGE)
- Kontrak Gulir Emas USD (KGEUSD)

2011 Komoditi Masih 'Seksi'

Faktor cuaca ekstrim diberbagai negara akan mendorong harga komoditi pangan di pasar internasional melonjak. Pergerakan harga itu akan berdampak positif pada sektor riil Indonesia yang memproduksi sejumlah komoditi dunia. Apakah bursa berjangka komoditi tanah air bisa menangkap momen ini?

Harga komoditi pangan di pasar internasional untuk tahun 2011, diperkirakan cenderung mengalami kenaikan. Hal itu dipengaruhi faktor iklim yang ekstrim, sehingga mengganggu produksi komoditi pangan. Dengan kondisi itu, berdampak pada respon pelaku pasar di pasar komoditi serta negara-negara produsen.

"Faktor utama yang memengaruhi situasi pangan 2011 adalah iklim, respons negara-negara produsen, dan aksi spekulasi di pasar komoditi," demikian antara lain diungkapkan Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi, usai melakukan komunikasi dengan berbagai lembaga internasional, seperti USDA, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), serta Bank Dunia, baru-baru ini.

Perhatian terhadap faktor iklim, kata Bayu, lebih jauh, tidak lagi hanya melihat kondisi iklim basah atau kering di suatu negara. Namun, harus lebih spesifik dengan melihat iklim ekstrem itu terjadi di mana dan komoditi apa yang terkena dampaknya. Misalnya, di sebagian negara Australia diperkirakan akan berlangsung iklim basah hingga

Maret 2011. Tentunya hal itu akan berdampak pada komoditi utama Australia, seperti gandum dan gula.

"Argentina juga menghadapi perubahan iklim yang tak baik, itu pun akan mengganggu produksi gandum dan kedelai. Dengan kondisi itu, diperkirakan pasokan gandum dan kedelai sampai Februari 2011 akan terpengaruh. Apalagi pada November 2010, lalu, China mengimpor 5,5 juta ton kedelai. Tentunya itu akan berpengaruh pada stok kedelai dunia," jelas Bayu.

"Dengan perkiraan yang demikian, para pialang dan pengelola dana akan meningkatkan aktivitas jual - beli kontrak berjangka komoditi hingga akhir tahun 2010. Dan terutama untuk transaksi kontrak 3 hingga 6 bulan ke depan," kata Bayu.

Terkait dengan itu, Dirut Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Megain Widjaya, mengatakan, "tentu saja kenaikan harga komoditi di pasar internasional akan memacu long hedger untuk melakukan hedging."

"Dengan kondisi pasar yang seperti itu, para investor pun akan mengambil posisi untuk merengut keuntungan ketika harga naik," ungkap Megain.

Naik 15 - 20 %

Perkiraan harga pangan akan melonjak di tahun 2011 nanti, sudah dapat pula diketahui dari perdagangan kontrak komoditi di Chicago Board of Trade (CBOT). Harga bahan pangan pokok, seperti beras dan gandum di CBOT terus merangkak naik.

Pada suatu sesi perdagangan CBOT dipertengahan Desember 2010, harga gandum CBOT untuk pengiriman Maret 2011, sudah mencapai 7,9625 sen dolar Amerika Serikat per bushel. Harga ini mengalami kenaikan sebesar 12,22 persen dibandingkan pada transaksi bulan November 2010. Saat itu, harga terigu masih berada di level 7,0950 sen dolar AS per bushel.

Lonjakan harga gandum CBOT itu dipicu turunnya produksi gandum di Australia, akibat cuaca ekstrim. Sebagaimana diketahui, Australiamerupakan eksportir gandum nomor empat di dunia. "Kenaikan harga gandum akan terus berlanjut sampai kuartal I tahun 2011," prediksi Vince Peterson, Wakil Presiden Asosiasi Gandum Amerika Serikat, seperti dikutip Bloomberg, belum lama ini.

Hal senada juga dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia (Apegti), Natsir Mansyur. Dikatakan Natsir, lonjakan

keuntungan dari kenaikan atau penurunan suatu harga komoditi.

"Inilah beda dengan pasar saham. Di pasar saham, di mana keuntungan hanya bisa terjadi jikalau harga asset naik. Sedangkan di bursa berjangka dimungkinkan untuk mengambil posisi long/short," terang Megain.

Namun, dari kenaikan harga-harga komoditi pangan itu, tambah Megain, tentu saja sektor riil akan makin berkembang dan para pelaku pasar dapat merasakan benefitnya secara langsung.

"Tentu saja peran bursa berjangka sebagai tempat pembentukan harga, acuan, dan informasi akan lebih dibutuhkan agar pelaku pasar bisa mendapatkan harga yang transparan ketika berjualan hasil komoditi mereka," kata Megain Widjaya.

"Tetapi yang jelas, kenaikan harga komoditi dunia itu tidak akan berpengaruh langsung dengan likuiditas bursa. Saat harga komoditi pun turun, bursa berjangka tetap diperlukan agar harga terus dapat dipantau. Jadi, likuiditas bursa terletak pada seberapa tekun bursa tersebut melakukan pengembangan kontrak berjangka, edukasi dan sosialisasi

Perlu kebijakan

Guna memantapkan ketahanan pangan nasional, menurut Bayu Krisnamurthi, pemerintah perlu merancang kebijakan khusus, dengan dua fokus utama. Pertama, aspek teknis, seperti pengembangan dan pemanfaatan teknologi, dukungan sarana dan prasarana bagi petani dalam beradaptasi dengan iklim.

Kedua, aspek perdagangan dan ekonomi. Ini diwujudkan antara lain dalam kebijakan untuk merespons secara cepat, dan bijaksana, situasi pasar internasional.

"Bentuknya sedang dipertimbangkan, instruksi presiden atau yang lainnya," kata Bayu.

Selain itu, Pemerintah RI akan memprioritaskan peningkatan produksi dalam negeri.

Tahun depan, produksi beras dalam negeri diperkirakan naik lebih dari 3 persen. "Namun, kunci kenaikan produksi itu terletak pada kecepatan aparat di daerah merespons serangan hama dalam tiga bulan pertama 2011," tandas Bayu Krisnamurthi. ▲

harga gandum dunia itu bakal berdampak pada harga terigu di dalam negeri. Apalagi, sejak pertengahan tahun ini, Rusia juga menyetop ekspor gandum untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

"Diperkirakan harga terigu dalam negeri akan naik berkisar 15 - 20 % dari harga sebelumnya," jelas Natsir.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, akhir November 2010, harga terigu domestik Rp 7.574 per kilogram (kg). Harga ini lebih mahal dibanding harga per Juni, Rp 7.482 per kg.

Sama dengan terigu, harga beras juga terus naik. Merujuk data Perum Bulog, harga beras naik Rp 25 - Rp 50 per kg. Contohnya, beras IR-64 kualitas III naik menjadi Rp 6.000 - Rp 6.100 per kg. Sementara harga beras jenis lain Rp 6.400 - Rp 6.500 per kg.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Sutono, memperkirakan, harga beras akan terus naik hingga awal 2011. "Sebab, Januari nanti masih dalam masa puncak pেকেলিক."

Benefit Sektor Riil

Dampak kenaikan harga pangan dunia di pasar internasional yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2011, nanti, tentunya akan berpengaruh dengan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Serta, para pelaku di sektor riil akan menikmati buah dari kenaikan harga-harga komoditi itu.

Menurut Megain Widjaya, ketika harga komoditi naik atau turun, sebenarnya tidak ada pengaruh signifikan atau minat dan antusias dari para pelaku pasar. Sebab, para pelaku pasar bisa saja mendapatkan

Komoditi Indonesia yang berpotensi mengalami kenaikan harga di pasar internasional pada tahun 2011

1. Komoditi Emas. Di tahun 2010, komoditi emas mencatatkan rekor tertinggi dengan melambung lebih dari US\$ 300, hingga menembus level psikologis US\$ 1.400 per ounce. Diperkirakan harga emas bisa menembus US\$ 1.500 - US\$ 1.600 per ounce.
2. Komoditi Karet, harga terbiak karet ditahun 2010 menyentuh level 501 yen per kg, dan berpeluang menyentuh 550 yen per kg.
3. Minyak mentah, diperkirakan mengalami kenaikan 9,41 %, menjadi US\$ 93 per barel pada 2011.
4. Komoditi Batubara diperkirakan naik 11,57 % menjadi US\$ 106 per ton
5. Komoditi CPO, diperkirakan mengalami kenaikan 22,95 %, menjadi 3.750 ringgit Malaysia per ton pada akhir 2011.
6. Komoditi Kakao. Harga komoditi ini di tahun 2011 cenderung stabil, dikisaran US\$ 3.053 ton.



Harga Kopi Internasional Turun

Kopi Arabika pada penutupan perdagangan di bursa ICE Futures, pertengahan Desember 2010, mengalami penurunan. Harga Kopi turun sebesar 0,05 % atau 0,10 poin dan berada pada level US\$ 204,55 per lb untuk kontrak Maret 2011. Namun, untuk kontrak jangka pendek, harga Kopi naik tipis 0,50 poin atau berada pada level US\$ 204,30 per lb.

Penurunan harga Kopi di bursa berjangka itu dipicu adanya aksi spekulasi pelaku pasar atas adanya laporan bahwa produksi Kopi Robusta Vietnam mengalami penurunan harga.

Sementara itu, harga Kopi di dalam negerirelatistabil dengan tren menanjak. Di Kabupaten Lampung Barat. Untuk Kopi kering masih stabil atau mencapai kisaran Rp 10.500 per kg. Kemudian di Kota Kendari, di sejumlah pasar penjualan hasil bumi, harga Kopi bubuk robusta yang biasanya Rp 35.000/kg naik menjadi Rp 36.000/kg. Naiknya

harga Kopi bubuk tersebut dipicu karena permintaan konsumen selama beberapa hari meningkat, sementara stok di tingkat pasar mulai berkurang akibat pengaruh cuaca.

Laporan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), menyampaikan, bahwa kenaikan permintaan Kopi 2010 ini tidak terlalu besar. Mengacu pada prediksi International Coffee Organization (ICO), permintaan Kopi hanya naik 2 % - 3 % setiap tahunnya. Masalahnya, curah hujan yang tinggi membuat banyak bunga Kopi rontok dan panen Kopi pun berkurang. Akibatnya, walaupun harganya cukup menarik namun para eksportir tak bisa menggenjot ekspor.

Harga ekspor Kopi pada 2011 diperkirakan bertahan mahal karena produksi masih akan tetap ketat ditengah permintaan yang juga diperkirakan stabil dengan tren meningkat. ▲

Permintaan Jagung Meningkat

Naiknya harga jagung di pasar internasional disokong dari laporan pemerintah Amerika Serikat yang menunjukkan peningkatan produksi etanol. Data Departemen Energi Amerika, menyebutkan, produksi etanol naik 6,1 % menjadi sebanyak 939.000 barel per hari. Ini adalah kenaikan produksi tertinggi sejak akhir Juli 2010, lalu.

"Data peningkatan konsumsi dan produksi etanol merupakan kejutan besar dan meningkatkan permintaan jagung," kata Jim Riley, pialang komoditas Linn Group.

Akibatnya, harga jagung untuk pengiriman Maret 2011 naik 12,75 sen atau 2,3 %. Sebelumnya, harga jagung terus turun dan mencapai harga terendah dalam seminggu di angka US\$ 5,52 per bushel.

Sementara pada 9 November, lalu, harga jagung mencapai harga tertingginya dalam 26 bulan kebelakang, di level US\$ 6,17 per bushel. Kenaikan harga jagung itu dipicu data Departemen Pertanian Amerika yang memproyeksikan panen tahun depan akan jatuh ke titik terendah sejak 1996 akibat cuaca buruk. ▲

Harga Gula Diprediksi Naik

Sejumlah analis memperkirakan harga komoditas gula di bursa berjangka akan naik seiring spekulasi bahwa musim hujan yang tidak dapat diprediksi, sehingga membatasi pasokan dan mengurangi ekspor dari India sebagai produsen kedua terbesar di dunia.

Sebanyak 5 dari 10 pedagang, analis, dan broker yang disurvei oleh Bloomberg, mengatakan, gula mentah di New York akan mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2010. Sebanyak 3 responden memprediksikan harga

gula tidak akan turun dan 2 lainnya memperkirakan ada sedikit perubahan.

Berdasarkan catatan Bloomberg, komoditas gula jatuh 0,9 % menjadi 28,71 sen per pon di bursa ICE Futures US. Broker senior Olympus Futures Chicago, Hank King, mengatakan, sektor komoditi India sedang mengalami musim tanam yang benar-benar buruk.

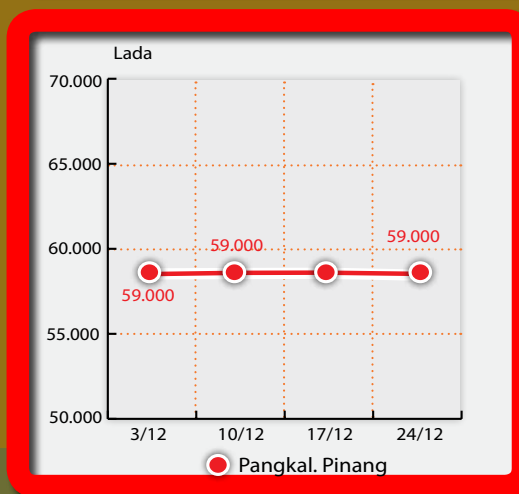
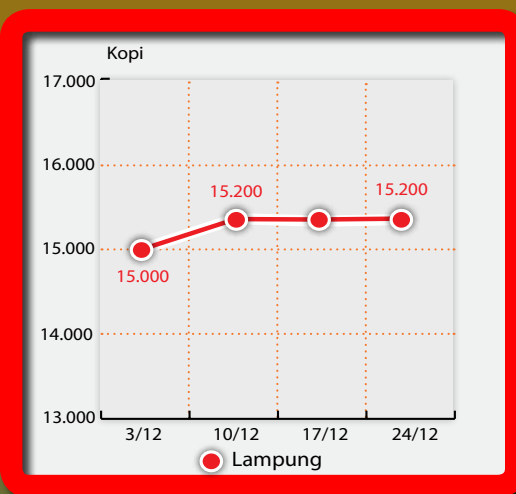
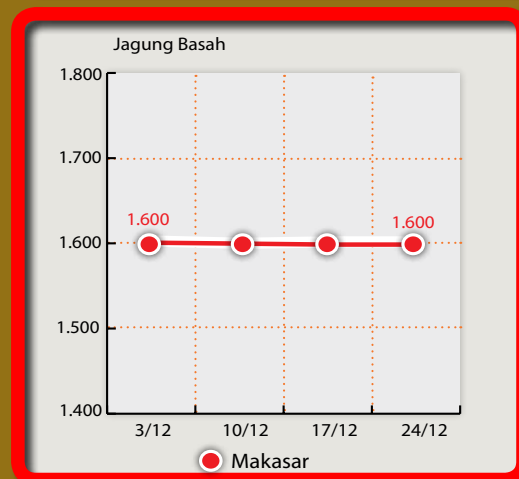
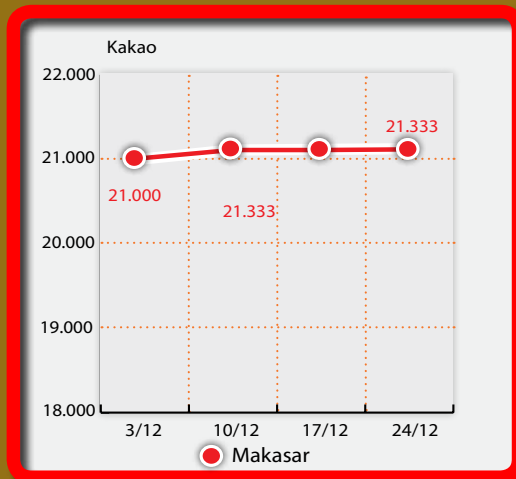
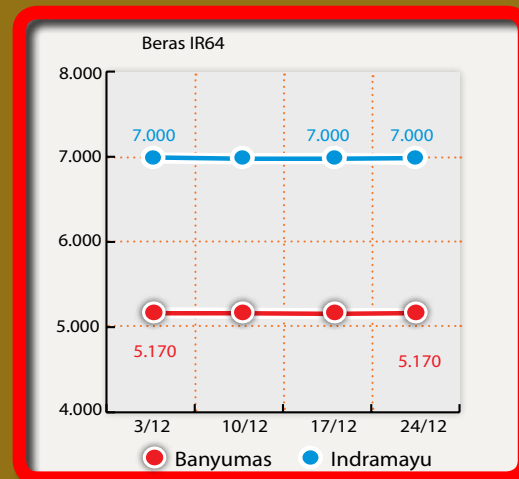
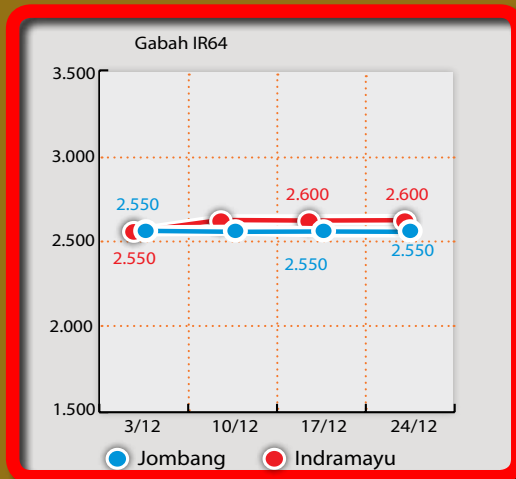
"India memiliki banyak permintaan untuk gula, dan tidak banyak pasokan," ujar Hank King, dikutip Bloomberg. sementara itu, broker yang berbasis

di London, Czarnikow Group Ltd., juga mengatakan yang sama. Permintaan global akan melebihi pasokan dalam tiga tahun berturut-turut. Akibatnya harga melonjak 30 % pada 12 bulan terakhir, sebagian karena kekhawatiran akan cuaca buruk di China dan Brasil berpotensi merugikan tanaman.

Sementara itu, Asosiasi Pabrik Gula India menyebutkan India akan memutuskan mengurangi batas ekspor pada minggu ketiga bulan Desember 2010. Diperkirakan, India hanya mengekspor 1,5 juta hingga 2 juta metric ton pada tahun ini. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)

infoharga.bappebti.go.id





Penting Edukasi Investasi

Pengantar Redaksi. International Organization of Securities Commission (IOSCO) dan International Forum for Investor Education (IFEI) menyelenggarakan seminar dengan tema 'Rebuilding the Trust of the Global Public'. Agenda tahunan ini diselenggarakan di Cairo, Egypt, pada 8 - 9 November 2010, lalu. Dari seminar yang dihadiri pejabat dan staf Bappebti, tersebut, ada banyak topik yang menarik untuk pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Dalam seminar itu, sejumlah negara memaparkan pengalaman pengembangan institusi pendidikan investasi dan perannya memajukan bursa serta meningkatkan kualitas investasi investor, berikut ini beberapa topik yang disarikan oleh Diah Sandita Arisanti, Kasubag Kerjasama, Bappebti.

Di Canada, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak informasi mengenai investasi keuangan, namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang investasi keuangan tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan investasi keuangan ini perlu disebarluaskan secara luas dan menyeluruh. Serta, dapat mencapai kelompok-kelompok yang rentan terkena risiko investasi keuangan ini. Selain itu, informasi yang diberikan juga

harus mudah diakses, bahkan pengetahuan mengenai investasi keuangan ini seharusnya sudah mulai diberikan pada sekolah dasar dan menengah. Kecurangan-kecurangan (Financial Fraud) yang sering terjadi dalam bisnis investasi keuangan merupakan masalah utama yang terjadi pada bisnis ini. Masalah lainnya adalah penawaran produk-produk yang rumit sehingga sulit dikuasai oleh investor. Di samping itu

peran para pelaku pasar juga seringkali bias sehingga berpotensi untuk melakukan penipuan.

Satu-satunya cara yang efektif untuk menjaga keamanan dalam bisnis investasi keuangan ini adalah pendidikan atau edukasi yang cukup bagi para calon investor. Pendidikan ini dapat diberikan dengan berbagai cara, antara lain :

1. Perlu adanya forum yang bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan terkait investasi keuangan yang diadakan oleh organisasi pemerintah yang berkoordinasi atau bekerjasama dengan sektor-sektor terkait. Seperti, pelayanan keuangan, lembaga non-profit, pemerintah, organisasi buruh dan pemilik organisasi perusahaan.

2. Perlu adanya strategi komunikasi untuk menyebarluaskan pengetahuan terkait investasi keuangan ini. Strategi komunikasi ini misalnya melalui:

Website untuk mengakses informasi
Penguluhan / Sosialisasi / Iklan
Tenaga Pendidikan/pengajar yang bersertifikasi
Call Center yang mudah dihubungi, dan sebagainya.

Dalam membangun kembali kepercayaan investor terhadap bisnis investasi keuangan ini, pemerintah Canada memiliki strategi nasional sebagai berikut :

- Memberikan peluang untuk melakukan perubahan
- Konsisten
- Menggunakan Sumber Daya secara efisien
- Menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat Top Down (dari pemerintah) dan Bottom (dari pelaku pasar)
- Selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait

Ada berbagai cara yang efektif dan inovatif dalam membangun kepercayaan dan keyakinan seseorang calon investor. Lembaga Inspiring Financial Learning (IEF) menerapkan pemikiran sebagai berikut:

1. Orang yang paling membutuhkan pendidikan investasi keuangan adalah orang yang paling tidak tertarik dengan pendidikan tersebut. Untuk itu kembangkan cara yang lebih baik untuk dapat menjangkau seseorang yang berbeda.
2. Permasalahan keuangan merupakan hal yang rumit dan menakutkan, untuk itu sesuaikanlah cara dalam penyampainnya pada tiap kelompok yang berbeda. Pemilihan kalimat yang tepat dan intonasi yang benar akan membantu para calon investor untuk memahami investasi keuangan.
3. Topic ini merupakan permasalahan pembelajaran yang memerlukan waktu panjang dan selalu berubah setiap saat. Untuk itu, dasar ilmu keuangan perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
4. Sebagian besar pendidikan Investasi keuangan diberikan oleh perusahaan keuangan yang secara tidak langsung yang ingin menjual produknya. Untuk itu jangkau orang-orang tersebut melalui media dan iklan serta alternatif lainnya.

Sementara itu, IEF menggunakan 4 (empat) langkah penting untuk membangun kepercayaan atau keyakinan seseorang calon investor. Yaitu;

1. Fokus pada kualitas
Keyakinan atau Kepercayaan dibangun dengan cara mengembangkan dan membagi informasi yang benar-benar berwawasan serta bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pahami tujuan peserta (Audience)
Untuk mengembangkan materi secara efektif, anda harus mengetahui apa yang sebenarnya dicari atau ingin diketahui oleh pendengar anda
3. Penyebarluasan merupakan hal tersulit
Dalam penyebarluasan informasi perlu adanya kerjasama dengan pihak lain untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Ukur progress anda untuk dalam jangka waktu panjang
Pemantauan dan pengembangan materi membutuhkan waktu lama. Pemantauan dilakukan setidaknya selama 3 - 5 tahun.

Di pihak lain, Securities Industry Development Corporation (SIDC), menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dalam membuat program-program yang efektif dan inovatif. SIDC menggabungkan Metode R.E.A.C.H., STAR dan 7S.

Metode-metode SIDC tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- R.E.A.C.H.
- Requirements of the Capital Market
- Educational, Engaging and fun
- Accesible and Always Available
- Customised to Different level of target Audience
- Holistic

Sementara itu, Korea Financial Investment Association (KFIA) memiliki program dalam memberikan pendidikan kepada calon investor, seperti berikut :

- Mengembangkan infranstruktur yang diperlukan, baik dalam bentuk online maupun offline
- Menyediakan berbagai jenis metode pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing investor.
- Menyediakan program pendidikan untuk usia muda dan kalangan sosial minoritas.
- Memiliki beragam cara untuk mengembalikan kepercayaan para investor
- Memberikan pendidikan untuk produk-produk baru
- Memiliki rencana untuk membangun Investor Education Experience Center.

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), agar pendidikan investasi keuangan berjalan efektif perlu adanya hal-hal berikut :

- Komitmen untuk jangka waktu yang panjang : investasi untuk masa depan; mulai belajar sesegera mungkin; jaga agar informasi tetap konsisten sepanjang waktu.
- Berkoordinasi dengan pihak yang dapat dipercaya : hindari konflik; kurangi duplikasi pekerjaan; bangun hubungan kerja antara pihak terkait
- Gunakan metode atau alat yang tepat dan sesuai : Kelompok/orang yang berbeda menghendaki pendekatan yang berbeda juga. Jika metode yang digunakan tepat maka penyampaian informasi akan lebih efisien.

Lain pula dengan Securities and Exchange Board of India (SEBI) dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan investasi keuangan bagi masyarakat India. SEBI mengembangkan tekni-tekni pendidikan, sebagai berikut :

- Setiap permintaan informasi dari investor ditanggapi melalui telepon, email, surat, FAQ yang ada di website, dan dijawab langsung jika investor datang ke Kantor SEBI. Bahkan saat ini sedang dibuat line khusus yang



- bebas biaya untuk membantu para investor dalam mendapatkan informasi (toll free helpline).
- Memiliki Website yang user friendly dan berisi berbagai informasi lengkap mengenai investasi, FAQ, serta berbagai literatur yang dapat dimanfaatkan oleh investor dan selalu diperbaharui. Saat ini website sedang dikembangkan agar dapat menyediakan informasi dalam bentuk teks dan audio visual dalam berbagai bahasa.
- Memanfaatkan asosiasi investor yang ada. Sampai dengan Agustus 2010 sudah ada 24 asosiasi yang diakui oleh SEBI untuk dapat menyelenggarakan workshop/seminar mengenai investasi di pasar saham/obligasi. Seluruh biaya workshop tersebut dapat direimburs ke SEBI. SEBI juga menyediakan tenaga-tenaga pengajar di bidang investasi saham/obligasi serta bahan-bahan cetakan yang berisi informasi tersebut.
- Menyebarakan pesan-pesan penting kepada publik dalam bentuk pesan pendek dan panjang. Pesan pendek biasanya disampaikan melalui Media Massa, iklan pada koran non-financial dalam beragam bahasa, Televisi pada waktu prime time selama 30 detik pada chanel TV yang tersedia dalam berbagai bahasa, Radio dan dalam bentuk video pendek yang dibuat oleh tenaga profesional.
- Berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait.

Menurut narasumber dari SEBI, jika investor terdidik, mereka akan selalu melatih dan memperbaharui kemampuannya, mengambil keputusan dalam melakukan investasi serta bertanggung jawab terhadap keputusannya tersebut. Mereka tidak akan meminta perhatian dan perlindungan dari pemerintah karena mereka memiliki kemampuan dan yakin bahwa mereka tidak menjerumuskan mereka sendiri kedalam masalah. Dengan kata lain, "investor terdidik adalah investor yang terlindungi." Dalam memberikan Pendidikan kepada Investor, tentunya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi, antara lain :

- Sulit menentukan dan mengukur apakah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang investor sudah cukup memadai atau belum, sedangkan banyak desain dan produk baru yang muncul dan memiliki risiko yang semakin tinggi sehingga membuat pengetahuan kita dapat menjadi usang/tertinggal setiap saat.
- Promosi produk keuangan harus dipisahkan dengan pemberian pendidikan bagi investor. Hal ini seringkali dicampuradukan sehingga pembelajaran investor bisa menjadi sarana pemasaran yang agresif.
- Kebutuhan akan pendidikan investor ini tidak terbatas pada kalangan atau kelompok tertentu. Suatu kelompok masyarakat mungkin merasa tidak membutuhkan pendidikan investor ini namun belum tentu hal tersebut benar. Oleh karena itu kebutuhan yang belum terlihat ini harus diubah menjadi suatu keinginan dan selanjutnya akan menjadi suatu kebutuhan.
- Memanfaatkan orang-orang terlatih yaitu dengan

memberikan pelatihan kepada tenaga honorer kemudian ditest, jika lulus test maka tenaga honor tersebut dianggap mampu mendidik para investor. Kemampuan tenaga honorer ini selalu direview setiap tahunnya.

- Menerapkan Pendidikan Investor ini pada seluruh organisasi pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendidikan bagi para aparat pemerintah. Sebelum pemerintah menjadi bagian dari Pendidikan Investor maka pemerintah harus mendapatkan Pendidikan Investor tersebut terlebih dahulu.
 - b. Menghindari adanya kepentingan pribadi (self interest)
 - c. Memahami investor dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai investor tersebut.
 - d. Memastikan semua keputusan dan kesepakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - e. Membuat aturan sedemikian rupa agar mudah dipahami
 - f. Pendidikan Investor yang dilakukan jangan sampai salah sasaran.

Sementara itu, menurut narasumber dari Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), terdapat beberapa teknik inovasi untuk mengevaluasi program-program edukasi investasi keuangan, diantaranya yaitu :

1. Mengevaluasikan kampanye perlindungan bagi para investor
 - Mempelajari profil korban dengan melihat tren demografi seperti usia, literasi keuangan, pendidikan, status perubahan kesehatan keuangan, jenis resiko.
 - Mempelajari faktor-faktor kunci resiko yaitu yang memiliki resiko investasi tinggi, mengandalkan teman, keluarga, rekan kerja untuk menasihati, terbuka terhadap investasi baru, kegagalan untuk memeriksa latar belakang dan pendaftaran produk dan profesional keuangan, dan tidak mampu untuk menggambarkan secara langsung.
 - Mempelajari persuasi dan penipuan dalam berinvestasi dengan melakukan analisis lebih dari 300 undercover. Taktik persuasi yang seringkali digunakan adalah phantom riches, kredibilitas sumber, konsensus sosial, timbale balik dan kelangkaan.
- Terdapat 3 bagian dalam menanggapi kecurangan dalam investasi outsmarting, yaitu :
 1. Resiko, mengetahui faktor resiko untuk kecurangan dalam investasi.
 2. Persuasi, mengetahui taktik yang paling sering digunakan.
 3. Pencegahan, mengetahui strategi pencegahan penipuan yang paling kuat.
- Dampak dari evaluasi kurikulum yaitu :
 1. Merekrut investor untuk menghadiri satu atau dua buah workshop
 2. memberikan kurikulum baru untuk kelompok pertama, kemudian meletakkan kedua kelompok dalam situasi hipotetis penipuan
 3. mengukur ketahanan perbedaan untuk mengajukan banding dalam penipuan. ▲

H. M. Hasbi MSi. Kadis Indagkop & Ukm, Barito Kuala, Kalsel

SRG

Mengubah Paradigma Petani

Mendapat mandat dari Bupati Barito Kuala (BATOLA), Kalsel, H. Hasanuddin Murad, untuk menelusuri program pemerintah tentang Sistem Resi Gudang (SRG), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, BATOLA, H. M. Hasbi MSi., langsung bergerak dengan langkah seribu. Seluruh informasi terkait tentang SRG dikumpulkannya guna memenuhi tugas yang diamanatkan.

"Meski saya orang dinas perdagangan, awalnya saya tidak banyak mengetahui tentang sistem resi gudang. Tetapi karena ditugaskan, saya jadi terpacu. Dan, dalam waktu yang singkat, kami sudah bisa membuat program sistem resi gudang di BATOLA." Demikian antara lain dikisahkan Hasbi, terkait dengan pengembangan SRG di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Sehingga, katanya lebih jauh, di tahun 2009, BATOLA mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan gudang SRG melalui dana stimulus fiskal.

Menurut pria kelahiran Banjarmasin, Kalsel, 1964, ini, Kab. BATOLA sangat berpotensi mengembangkan SRG. Karena, BATOLA merupakan salah satu daerah sentra produksi gabah terbesar di Kalimantan. Bahkan ditingkat nasional, BATOLA menempati urutan ke sembilan sebagai daerah penyangga program ketahanan pangan.

"Sejak tahun 2005, BATOLA selalu surplus gabah. Di tahun 2009, saja, kami surplus lebih dari 300 ribu ton. Dan selama ini, surplus tersebut diperdagangkan antar daerah dan antar pulau," kata suami dari Nurul Martirati, yang dinikahinya pada tahun 1989, itu.

Itulah dasar pemikiran kami mengembangkan SRG di BATOLA, tambahnya.

Sejak bantuan itu turun akhir tahun 2009, sudah berdiri satu unit gudang SRG dengan kapasitas 1.200 ton di Desa Puntik Luar, Mandastana, BATOLA.

"Operasional perdana gudang SRG itu dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2010. Dan yang meresmikan gudang itu langsung dilakukan oleh Bupati BATOLA, H. Hasanuddin Murad, mewakili Gubernur Kalsel."

Tahap awal komoditi gabah yang disimpan dalam gudang skema SRG mencapai 94.990 ton. Gabah tersebut berasal dari sebanyak 17 Koptan. "Dalam perjalanannya, tiga Koptan mendapat pembiayaan dari BPD Kalsel. Sedangkan 14 Koptan lainnya, menunggu saat tepat ketika harga gabah beranjak naik."

"Ketika gabah masuk gudang, saat itu harga pasaran gabah di BATOLA berkisar Rp 5.000 per kg, tetapi ketika para petani itu mau menjual harga gabah sudah mencapai Rp 8.000 per kg. Jadi para petani mendapatkan margin cukup besar sekitar Rp 3.000 per kg," jelas tiga ayah ini.

Menurut Hasbi, dari keberhasilan itu potensi BATOLA sangat besar mengembangkan SRG. "Satu unit gudang SRG rasanya masih kurang. Dengan surplus gabah yang demikian besar, setidaknya dibutuhkan tiga unit gudang SRG."

Dukungan

Melihat keberhasilan ini, dukungan dari berbagai pihak pun mengalir. Seperti dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah, menyumbangkan satu unit alat pengering gabah. Demikian juga dari pihak

legislatif, melalui Komisi III DPRD, BATOLA, mendukung anggaran pengembangan SRG di BATOLA. Bentuk dukungan anggaran itu berupa subsidi biaya penyimpanan hingga 600 ton, anggaran sosialisasi dan anggaran kelengkapan gudang.

"Bentuk dukungan lain juga datang dari pimpinan Bank Indonesia, Kalsel, yang meminta pimpinan perbankan daerah baik bank swasta maupun bank BUMN, untuk melakukan studi banding implementasi SRG di Jombang, Jatim, pada tahun 2009," jelas alumnus Fak. Ekonomi, ULAM, 1997, ini.

"Mengalirnya dukungan dari berbagai pihak itu, membuat kami makin bersemangat dalam mengembangkan SRG di BATOLA. Terutama dukungan yang tidak putus-putus dari Bappebti, seperti menyediakan tenaga pendamping SRG. Tanpa tenaga pendamping, gudang SRG itu tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan diharapkan," jelas Hasbi.

"Rencananya, dari informasi yang kami terima, ditahun 2011, nanti, Bappebti juga sudah memprogramkan memberi bantuan alat transportasi berupa truk untuk operasional gudang SRG di BATOLA," ujar Hasbi.

Lebih jauh dikatakan alumnus S2 Univ. Merdeka, Malang, ini, meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya petani akan manfaat SRG merupakan tugas terberat. Sebab, hal itu mengubah paradigma, pola pikir dan budaya ditengah tantangan banyaknya para spekulasi dikalangan petani.

"Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi yang utama. Namun, dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah seperti diamanatkan UU No. 9/2006, kami yakin program ini akan berjalan dan berkembang," tandas Hasbi. ▲

*Merry
Christmas
2010*

and

*Happy
New Year
2011*

*Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan*